

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

Oleh:

Arif Ridwanto¹

Nik Haryanti²

Andiwi Meifilina³

Universitas Islam Blitar

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 16, Jl. Majapahit No.2- 4, Sananwetan, Kec. Sananwetan,
Kota Blitar, Jawa Timur (66137).

Korespondensi Penulis: arifrdwnt@gmail.com, nikharyanti@gmail.com,
andiwimeifilina1@yahoo.co.id

Abstract. *This study highlights the low level of political participation in Blitar City, especially among young voters, women, and people with disabilities. This is due to limited access to information and ineffective socialization methods. The purpose of this study is to analyze the role of political socialization by the Blitar City General Elections Commission (KPU) in increasing voter participation in the 2024 Regional Elections and to identify supporting and inhibiting factors. The study used a qualitative descriptive method with purposive sampling techniques, interviews, observations, documentation, and literature studies. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman approach. The results show that the Blitar City KPU carried out socialization in formal, informal, direct, and indirect forms. This socialization plays a role in increasing political awareness, encouraging participation, and strengthening public control. Supporting factors include an open environment, community leaders, and social media. Meanwhile, obstacles include low political literacy, the spread of hoaxes, and uneven information. The KPU is advised to optimize social media, strengthen volunteers, and collaborate with communities and local media.*

Keywords: *Political Participation, Political Socialization, KPU Blitar City, 2024 Regional Elections, Young voters, people with disabilities.*

Received August 23, 2025; Revised August 15, 2025; September 26, 2025

*Corresponding author: arifrdwnt@gmail.com

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

Abstrak. Penelitian ini menyoroti rendahnya partisipasi politik di Kota Blitar, terutama di kalangan pemilih muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses informasi dan metode sosialisasi yang kurang efektif. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran sosialisasi politik oleh KPU Kota Blitar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Blitar melaksanakan sosialisasi dalam bentuk formal, informal, langsung, dan tidak langsung. Sosialisasi ini berperan dalam meningkatkan kesadaran politik, mendorong partisipasi, dan memperkuat kontrol publik. Faktor pendukung meliputi lingkungan yang terbuka, tokoh masyarakat, dan media sosial. Sementara hambatannya adalah rendahnya literasi politik, penyebaran hoaks, dan informasi yang tidak merata. KPU disarankan mengoptimalkan media sosial, memperkuat relawan, dan bekerja sama dengan komunitas serta media lokal.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Sosialisasi Politik, KPU Kota Blitar, Pilkada 2024, Pemilih muda, disabilitas.

LATAR BELAKANG

Rendahnya efektivitas sosialisasi politik menjadi perhatian nasional, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda, perempuan, dan penyandang disabilitas (Siregar D. &, 2023). Sosialisasi yang masih terfokus pada metode konvensional dan belum memanfaatkan secara optimal media digital menyebabkan kesenjangan informasi, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama.

Kondisi ini juga tercermin di Kota Blitar menghadapi sejumlah tantangan terkait sosialisasi politik, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat. Terutama kelompok pemilih muda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan yang masih memiliki tingkat keterlibatan rendah. Masih terdapat kesenjangan informasi dan pemahaman politik, yang menyebabkan sikap apatis dan kurangnya antusiasme untuk mengikuti proses politik di tingkat lokal (Gusti N. E., 2024). Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu belum merata

sehingga tidak semua lapisan masyarakat mendapat informasi yang cukup untuk berpartisipasi aktif. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam penyebaran informasi politik yang efektif dan inklusif di Kota Blitar.

Partisipasi politik pemilih muda di Indonesia menjelang Pilkada Serentak 2024 menjadi isu krusial, mengingat kelompok ini yang terdiri dari generasi Z dan milenial mencakup lebih dari 50% total pemilih nasional. Namun, tingkat keterlibatan mereka cenderung rendah akibat kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik, minimnya informasi yang relevan, serta ketidakpuasan terhadap pilihan politik yang tersedia (Siregar D. , 2024). Data KPU menunjukkan pemilih muda mendominasi daftar pemilih tetap di Kota Blitar, namun tingkat partisipasi mereka masih rendah akibat kurangnya ketertarikan terhadap isu politik lokal dan keterbatasan akses informasi. Meski KPU telah meluncurkan program seperti “Pilkada Gembira”, pendekatannya belum sepenuhnya menjangkau kelompok tersebut secara efektif.

Salah satu cara penting untuk mengukur tingkat demokrasi di suatu wilayah adalah dengan melihat seberapa besar partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah, atau Pilkada. Partisipasi politik merupakan indikator penting kualitas demokrasi. Tingkat partisipasi ini sering dijadikan tolak ukur kualitas demokrasi karena mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab warga dalam kehidupan politik (Siregar, 2021). Meskipun terdapat peningkatan partisipasi dari 79,2% (2020) menjadi 80,17% (2024), tantangan partisipasi kelompok rentan masih signifikan. Peningkatan hampir 2% ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, meskipun Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Blitar juga meningkat, mencapai 120.720 pada tahun 2024, dari 114.890 pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan populasi pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi pemilih Kota Blitar pada Pilkada 2020 mencapai sekitar 79,2%, yang merupakan yang tertinggi di Jawa Timur dan melebihi target nasional sebesar 77%.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Blitar 2024 dibandingkan 2020 disebabkan oleh sosialisasi intensif dari KPU, seperti kegiatan di sekolah, lomba videografi, dan pelibatan organisasi kepemudaan. Serta peningkatan akses bagi pemilih

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

difabel yang partisipasinya naik dari 47% menjadi 54,07%. Pendekatan kreatif dan kolaboratif ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih secara signifikan.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada serta berperan sebagai agen yang meminimalisir rantai golput yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk apatisme. KPU memiliki peran dalam meningkatkan kenetralan, independensi, serta integritas lembaga, melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, simulasi proses pemilihan, dan menyediakan aksesibilitas proses pemilihan (Lintang.dkk., 2022). Meski demikian, kedua penelitian tersebut memiliki keterbatasan, yaitu fokus penelitian.

Melihat hasil Pilkada tahun 2020 hingga 2024 di Kota Blitar, yang menandakan adanya dinamika demografis maupun peningkatan kesadaran politik masyarakat. Adanya peningkatan partisipasi politik di Kota Blitar dari tahun 2020 79,2% dan di tahun 2024 80,17%, adanya selisih sebesar 2% , peneliti ingin meneliti peran dan faktor sosialisasi politik, maka peneliti tertarik menulis judul "Peran Sosialisasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pilkada 2024 di Kota Blitar".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan keleluasaan dalam menggambarkan peran sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik pada pilkada 2024 di Kota Blitar secara sistematis, faktual, dan akurat. Lokasi penelitian dilakukan di KPU Kota Blitar sebagai lembaga penyelenggara Pilkada yang memiliki peran dalam pelaksanaan dan penyampaian kegiatan sosialisasi politik kepada masyarakat. Data primer berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian, melalui observasi partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Subjek penelitian ini terdiri dari empat informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu satu Komisioner KPU Kota Blitar, satu Ketua Pepabri Kota Blitar, penyandang difabel dan siswa SMA sebagai representasi pemilih pemula, pemilih difabel dan pemilih Gen-Z. Waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan, yakni mulai bulan Maret hingga Juli 2025. Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Untuk membuktikan keakuratan atau keabsahan data,

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sosialisasi Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilkada 2024 Di Kota Blitar

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar menjelang Pilkada 2024 menunjukkan adanya integrasi pendekatan yang beragam dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Pendekatan tersebut terbagi ke dalam empat bentuk utama, yaitu sosialisasi politik formal, informal, langsung, dan tidak langsung. Masing-masing bentuk memiliki peran, strategi, dan tantangan tersendiri, namun semuanya diarahkan pada tujuan utama untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi lokal.

1. Sosialisasi Politik Formal

a. Kredibilitas KPU Kota Blitar sebagai lembaga formal

Bahwa kredibilitas KPU Kota Blitar dalam menyampaikan sosialisasi politik menjelang Pilkada 2024 dibangun melalui prinsip profesionalitas, netralitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sosialisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan mitra strategis. Informasi yang disampaikan selalu bersumber dari regulasi resmi dan disampaikan oleh SDM yang kompeten, sehingga masyarakat menerima informasi yang akurat dan terpercaya. Kredibilitas ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

b. Bentuk sosialisasi politik formal KPU Kota Blitar

Bentuk kegiatan sosialisasi politik formal yang dilakukan KPU Kota Blitar mencakup sosialisasi tatap muka di sekolah, kampus, instansi pemerintah, forum warga, dan dialog publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, penyebaran bahan sosialisasi seperti pamflet, baliho, dan spanduk dilakukan secara masif di titik strategis. Pemanfaatan media sosial dan website resmi juga dioptimalkan untuk menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan luas. Hal ini

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

menunjukkan komitmen KPU dalam menyampaikan informasi politik secara terstruktur dan merata.

c. Peran kelembagaan dalam melaksanakan sosialisasi politik

Peran kelembagaan KPU Kota Blitar dalam menyusun dan melaksanakan sosialisasi politik formal dilakukan dengan berpedoman pada visi dan misi untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. Penyusunan program disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan masyarakat melalui pemetaan kelompok sasaran. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara transparan dan inklusif dengan melibatkan berbagai elemen seperti sekolah, kampus, komunitas, serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi.

d. Peran kerja sama antar lembaga

Kerja sama antar lembaga menjadi strategi penting KPU Kota Blitar dalam mendukung tujuan sosialisasi politik formal. Melalui kolaborasi dengan Bawaslu, Forkopimda, dan instansi pemerintahan setempat, KPU berupaya memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat valid, sah, dan mudah dipahami. Sinergi ini memperkuat kredibilitas sosialisasi sekaligus memperluas jangkauan dan efektivitasnya, sejalan dengan tujuan jangka panjang KPU dalam memperkuat demokrasi dan membangun partisipasi politik yang berkelanjutan.

e. Target KPU dari kegiatan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi politik formal yang dilakukan KPU Kota Blitar memiliki target jangka panjang dalam membangun budaya demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dalam satu periode pemilu, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan terstruktur, KPU berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi sebagai bagian dari penguatan demokrasi kelembagaan.

Sosialisasi politik formal yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar menjelang Pilkada 2024 merupakan upaya strategis yang mencerminkan

peran kelembagaan dalam membangun budaya demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. KPU Kota Blitar menunjukkan kredibilitasnya sebagai lembaga formal melalui prinsip profesionalitas, netralitas, transparansi informasi, akuntabilitas kegiatan, serta penyampaian materi yang berbasis regulasi dan disampaikan oleh SDM kompeten. Bentuk kegiatan sosialisasi formal yang dijalankan meliputi tatap muka di sekolah, kampus, instansi pemerintah, forum warga, dialog publik bersama tokoh masyarakat, serta penyebaran pamflet, baliho, dan pemanfaatan media sosial dan website resmi. Seluruh kegiatan ini dirancang selaras dengan visi misi KPU, yaitu menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif, dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat melalui pemetaan kelompok sasaran. Selain itu, KPU juga menjalin kerja sama dengan Bawaslu, Forkopimda, dan instansi pemerintahan setempat guna memastikan informasi yang disampaikan sah, valid, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi formal ini tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk kesadaran politik masyarakat dalam jangka panjang agar lebih memahami hak dan kewajiban politiknya serta aktif dalam proses demokrasi.

2. Sosialisasi Politik Informal

a. KPU Kota Blitar dalam memfasilitasi sosialisasi politik

KPU Kota Blitar berperan aktif dalam memfasilitasi sosialisasi politik secara informal meskipun berlangsung di luar kerangka resmi kelembagaan. Dukungan diberikan melalui penyediaan materi sosialisasi, penyebaran informasi digital, dan pelibatan tokoh lokal sebagai agen penyampai informasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi politik yang beredar di masyarakat tetap valid dan edukatif. Upaya tersebut mencerminkan strategi KPU dalam memanfaatkan ruang komunikasi informal guna memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan politik.

b. Bentuk sosialisasi informal dari dorongan KPU Kota Blitar

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

KPU Kota Blitar mendorong terbentuknya sosialisasi politik informal melalui pendekatan yang lebih santai dan dekat dengan masyarakat. Salah satu bentuk yang muncul adalah diskusi ringan di ruang publik seperti warung kopi, yang melibatkan warga dan komunitas lokal. Dalam forum-forum tersebut, KPU menyisipkan informasi pemilihan secara tidak langsung namun tetap efektif. Strategi ini mencerminkan upaya KPU dalam memanfaatkan ruang sosial informal sebagai media edukasi politik yang komunikatif dan mudah diterima oleh masyarakat.

c. Dampak sosialisasi politik informal

Sosialisasi politik informal memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat. Melalui percakapan sehari-hari di lingkungan keluarga, tempat kerja, tongkrongan, hingga media sosial, informasi seputar pemilu dapat tersebar secara luas dan mudah dipahami. Ketika informasi yang dibagikan bersifat positif dan akurat, hal ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih. Sosialisasi informal menjadi jembatan komunikasi yang efektif karena menjangkau masyarakat secara lebih personal, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Sosialisasi politik informal yang difasilitasi oleh KPU Kota Blitar menjadi strategi pelengkap dalam memperluas jangkauan edukasi politik di luar ranah formal kelembagaan. Meskipun berlangsung secara non-struktural, KPU tetap berperan aktif melalui penyediaan materi sosialisasi, distribusi informasi digital, serta pelibatan tokoh lokal guna menjaga validitas dan konstruktivitas pesan politik yang beredar. Dorongan KPU turut melahirkan berbagai bentuk komunikasi informal seperti diskusi santai di warung kopi, perbincangan komunitas, hingga percakapan sehari-hari di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan media sosial, yang disisipi informasi pemilihan secara natural dan komunikatif. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ketika informasi yang tersebar bersifat positif dan akurat, masyarakat terdorong

untuk lebih memahami hak pilihnya dan terlibat aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, sosialisasi politik informal memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi yang lebih akrab dan kontekstual dalam membangun budaya demokrasi partisipatif.

3. Sosialisasi Politik Langsung

a. Dampak emosional sosialisasi politik langsung

Sosialisasi politik secara langsung yang dilakukan KPU memberikan dampak emosional yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk memilih. Melalui pertemuan tatap muka yang santai dan komunikatif, masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses demokrasi. Perasaan bahwa suara mereka penting dan diakui mendorong tumbuhnya kesadaran akan hak pilih. Kedekatan emosional ini menjadi faktor pendorong yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya.

b. KPU memfasilitasi keterlibatan individu dalam kegiatan sosialisasi

KPU Kota Blitar memfasilitasi keterlibatan individu secara langsung dalam sosialisasi politik menjelang Pilkada melalui berbagai kegiatan partisipatif. Kegiatan seperti jalan sehat demokrasi, diskusi warga, dan sosialisasi tatap muka menjadi sarana interaksi langsung antara KPU dan masyarakat. Selain itu, KPU juga memberdayakan relawan demokrasi serta melibatkan komunitas, tokoh lokal, pemuda, dan perempuan sebagai bagian dari proses sosialisasi. Pendekatan ini mencerminkan keterbukaan KPU dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan antara penyelenggara pemilu dan warga.

c. Bentuk keterlibatan langsung masyarakat

KPU Kota Blitar mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan partisipasi pada Pilkada. Bentuk keterlibatan tersebut meliputi menjadi relawan demokrasi, hadir dalam kegiatan sosialisasi, menjadi pembicara lokal di komunitas, dan membantu menyebarkan informasi kepemiluan di lingkungan sekitar. Selain itu, KPU juga mengajak generasi muda untuk aktif menyuarakan

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

pentingnya Pilkada melalui media sosial. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran kolektif dan memperluas jangkauan pesan demokrasi di masyarakat.

- d. Tantangan yang dihadapi KPU dalam mengajak individu untuk terlibat dalam sosialisasi politik

KPU Kota Blitar menghadapi berbagai tantangan dalam mengajak masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi politik menjelang Pilkada. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan kesibukan masyarakat, serta sikap apatis dan kurangnya kepercayaan terhadap proses politik. Beberapa masyarakat menganggap politik bukan urusan mereka, sehingga enggan terlibat. Untuk menjawab tantangan ini, KPU menerapkan pendekatan yang humanis dan komunikatif, disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar pesan politik lebih mudah diterima dan partisipasi dapat meningkat.

- e. Individu yang terlibat dengan sosialisasi langsung

KPU Kota Blitar menerapkan langkah sistematis untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam sosialisasi langsung memahami materi politik dengan benar. Sebelum turun ke lapangan, peserta sosialisasi wajib mengikuti pembekalan atau pelatihan, di mana materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selama kegiatan berlangsung, KPU juga melakukan pendampingan dan pemantauan secara aktif. Jika ditemukan informasi yang keliru, KPU segera melakukan klarifikasi. Upaya ini bertujuan menjaga akurasi pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat agar tetap informatif dan tidak menyesatkan.

Sosialisasi politik langsung yang dilakukan KPU Kota Blitar menjelang Pilkada 2024 memiliki dampak yang kuat, terutama secara emosional, karena melalui interaksi tatap muka masyarakat merasa dihargai, dilibatkan, dan memiliki peran penting dalam proses demokrasi, sehingga mendorong minat mereka untuk menggunakan hak pilih. KPU secara aktif memfasilitasi keterlibatan individu melalui kegiatan seperti jalan sehat demokrasi, diskusi warga, sosialisasi tatap

muka, serta pemberdayaan relawan demokrasi yang melibatkan tokoh lokal, pemuda, dan perempuan. Bentuk keterlibatan langsung juga mencakup menjadi pembicara komunitas, menyebarkan informasi kepemiluan, hingga mendorong partisipasi generasi muda melalui media sosial. Namun, KPU menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu, apatisme politik, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, yang diatasi melalui pendekatan humanis dan komunikatif. Untuk menjaga akurasi informasi, KPU memberikan pembekalan dan pelatihan kepada setiap individu yang terlibat, memantau pelaksanaan sosialisasi, serta siap meluruskan informasi keliru. Pendekatan langsung ini menunjukkan komitmen KPU dalam memperkuat partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan membangun kepercayaan publik terhadap pemilu.

4. Sosialisasi Politik Tidak Langsung

a. Media yang sering digunakan KPU

Dalam menyampaikan sosialisasi politik secara tidak langsung menjelang Pilkada 2024, KPU Kota Blitar memanfaatkan berbagai media digital dan tradisional. Media yang digunakan meliputi Instagram, Facebook, TikTok, website resmi KPU, radio lokal, spanduk, baliho, poster, dan selebaran. Pendekatan ini memungkinkan informasi kepemiluan menjangkau masyarakat secara luas, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Strategi multikanal ini menjadi solusi efektif untuk menyebarkan pesan politik secara cepat dan efisien tanpa harus melalui interaksi langsung.

b. Keuntungan metode sosialisasi politik tidak langsung

Metode sosialisasi politik tidak langsung yang diterapkan KPU Kota Blitar memiliki keuntungan strategis dalam hal jangkauan dan fleksibilitas. Informasi kepemiluan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui media sosial dan platform digital, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penyebaran informasi yang cepat dan viral juga menjadi keunggulan tersendiri. Selain itu, metode ini memudahkan masyarakat yang sibuk

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

atau tinggal jauh dari pusat kota untuk tetap mendapatkan informasi secara efisien dan praktis.

c. KPU Kota Blitar membangun ketertarikan masyarakat

Dalam membangun ketertarikan masyarakat melalui sosialisasi politik tidak langsung, KPU Kota Blitar menerapkan pendekatan yang kreatif dan komunikatif. Konten disajikan secara menarik melalui desain kekinian, video pendek yang informatif dan menghibur, serta penggunaan bahasa santai agar mudah dipahami. Selain itu, KPU menggandeng influencer lokal dan komunitas digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih personal. Strategi ini membuat pesan pemilihan terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membangun rasa keterlibatan dan mendorong partisipasi aktif dalam Pilkada, meskipun tanpa interaksi tatap muka.

d. Media yang sering digunakan KPU

KPU Kota Blitar secara strategis menggunakan beragam media dalam sosialisasi politik tidak langsung, disesuaikan dengan segmen masyarakat yang dituju. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube menjadi pilihan utama karena banyak masyarakat, terutama generasi muda, aktif di platform tersebut. Untuk menjangkau masyarakat yang belum aktif di dunia digital, KPU juga memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar. Pendekatan multikanal ini memungkinkan penyebaran informasi pemilihan secara lebih luas dan efektif.

e. Tantangan utama KPU dalam sosialisasi politik secara tidak langsung

Penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi politik tidak langsung oleh KPU Kota Blitar menghadapi beberapa tantangan penting. Salah satu tantangan utama adalah cepatnya penyebaran hoaks dan informasi palsu yang sering kali lebih dipercaya dibanding informasi resmi dari KPU. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat secara negatif. Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menjadi kendala tersendiri, karena tidak semua masyarakat dapat dijangkau melalui media digital. Kondisi ini menuntut KPU untuk terus

mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif dan menjangkau seluruh segmen masyarakat secara merata.

Sosialisasi politik tidak langsung yang dilakukan KPU Kota Blitar merupakan strategi efektif untuk menjangkau masyarakat secara luas, khususnya generasi muda yang aktif di ruang digital. KPU memanfaatkan beragam media seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website resmi, radio, televisi, surat kabar, baliho, spanduk, serta selebaran yang disebarakan melalui komunitas. Metode ini memungkinkan penyampaian informasi yang fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu, serta mudah diakses kapan saja. Untuk membangun ketertarikan masyarakat, KPU menyajikan konten kreatif berupa desain kekinian, video pendek yang lucu namun informatif, serta bahasa yang santai dan mudah dipahami. Kerja sama dengan influencer lokal dan komunitas digital juga dilakukan agar pesan terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, tantangan utama dalam sosialisasi tidak langsung adalah maraknya penyebaran hoaks dan informasi palsu yang lebih cepat dipercaya dibandingkan informasi resmi, serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Oleh karena itu, KPU harus terus melakukan inovasi komunikasi yang adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan tersebut agar pesan kepemiluan tetap dapat tersampaikan secara akurat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat Kota Blitar dalam Pilkada 2024 mencerminkan keterlibatan yang beragam, baik dalam bentuk formal seperti pemberian suara (voting), maupun non-formal seperti keterlibatan dalam kelompok masyarakat, hingga protes politik. Variasi bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal semakin bergerak ke arah yang lebih inklusif dan reflektif terhadap dinamika sosial yang ada.

1. Protes Activity

- a. Cara protes masyarakat dalam menunjukkan kekecewaan pada pilkada

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

Protes masyarakat dipandang sebagai bentuk ekspresi sah dalam demokrasi, terutama saat muncul kekecewaan terhadap proses Pilkada. Ketiga informan sepakat bahwa protes boleh dilakukan asal tetap damai, tertib, dan sesuai hukum. Selain menyalurkan aspirasi, protes juga menjadi pengingat bagi penyelenggara untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

b. Protes sebagai cara penyampaian aspirasi politik

Protes dipandang sebagai cara yang wajar dan sah untuk menyampaikan aspirasi politik dalam sistem demokrasi. Selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai hukum, protes menjadi bentuk kesadaran politik masyarakat. Selain sebagai sarana kritik dan koreksi, protes juga mencerminkan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat dalam menjaga jalannya proses demokrasi.

c. Pandangan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pilkada

Kepercayaan masyarakat terhadap KPU sangat penting, terutama saat menghadapi protes. Transparansi, keterbukaan, dan respons cepat terhadap kritik menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Jika dikelola dengan baik, protes justru dapat menjadi sarana evaluasi untuk memperkuat kualitas demokrasi.

d. Protes masyarakat terkait hasil partisipasi pilkada

Terdapat sebagian masyarakat yang memprotes rendahnya tingkat partisipasi Pilkada. Protes ini dinilai sebagai masukan konstruktif agar KPU memperkuat sosialisasi, memperluas jangkauan edukasi, serta memastikan akses yang merata, terutama bagi generasi muda dan kelompok rentan

e. Protes dari masyarakat ke KPU terkait kecurangan pilkada

Protes dari masyarakat ke KPU terkait dugaan kecurangan Pilkada, seperti politik uang dan manipulasi suara. Protes ini mencerminkan kepedulian serta sikap kritis masyarakat terhadap integritas pemilu. Para informan menilai pentingnya respons KPU yang terbuka, profesional, dan tegas—bekerja sama dengan Bawaslu

dan aparat hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pelaksanaan Pilkada berlangsung jujur serta adil bagi semua pihak.

Protes politik dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Blitar dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk ekspresi sah dalam sistem demokrasi yang mencerminkan kesadaran politik dan kepedulian terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan yakni tokoh masyarakat, penyandang disabilitas, dan generasi muda diketahui bahwa protes dipahami sebagai sarana untuk menyampaikan kekecewaan atau aspirasi politik, asalkan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai hukum. Protes ini mencakup kritik terhadap rendahnya partisipasi pemilih, kurang meratanya sosialisasi, hingga dugaan kecurangan seperti politik uang atau manipulasi suara. Ketiga informan sepakat bahwa kepercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara Pilkada sangat bergantung pada sikap responsif, transparansi, dan profesionalisme dalam menanggapi protes maupun keluhan masyarakat. Oleh karena itu, protes tidak hanya menjadi saluran kritik, tetapi juga momentum evaluatif bagi KPU untuk meningkatkan integritas, keadilan, serta memperluas keterlibatan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok muda dan rentan, dalam proses demokrasi.

2. Voting sebagai Hak Konstitusional dan Instrumen Legitimasi

a. Pentingnya suara dalam pilkada

Memberikan suara dalam Pilkada dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional warga negara. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat, termasuk generasi muda dan penyandang disabilitas, turut menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan di daerah. Melalui hak pilih, suara rakyat dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan dan masa depan demokrasi yang inklusif.

b. Alasan masyarakat datang ke TPS

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

Alasan masyarakat mau datang ke TPS umumnya karena peduli terhadap masa depan daerah, percaya pada sistem pemilu, dan mendukung calon tertentu. Sebaliknya, yang enggan datang biasanya dipengaruhi oleh apatisme, ketidakpercayaan terhadap pemilu, kurangnya edukasi politik, merasa suara tidak berpengaruh, atau hambatan akses terutama bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi politik dinilai penting untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.

c. Perasaan informan jika tidak ada orang yang memilih

Para informan umumnya menyayangkan jika ada warga yang tidak menggunakan hak pilih meskipun sudah terdaftar. Mereka menilai hal itu sebagai bentuk penyalahgunaan kesempatan untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan daerah. Tidak memilih juga dipandang bisa menurunkan kualitas demokrasi, terlebih ketika banyak pihak termasuk penyandang disabilitas tetap berusaha datang ke TPS meskipun menghadapi hambatan.

d. Voting sebagai ketentuan arah kebijakan pemerintah

Voting dipandang sangat penting karena menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dan sarana warga negara untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Melalui partisipasi aktif dalam pemilu, masyarakat turut memengaruhi kebijakan publik di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Voting juga dianggap sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membentuk masa depan bangsa, mulai dari tingkat lokal.

e. Cara meningkatkan peran voting

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya voting dalam Pilkada dapat ditingkatkan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan inklusif. Sosialisasi harus menjangkau semua kalangan, termasuk kelompok rentan dan generasi muda, dengan pendekatan yang sesuai seperti kampanye digital, diskusi publik, edukasi di sekolah, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan komunitas lokal. Upaya ini penting agar masyarakat memahami

bahwa satu suara memiliki dampak besar terhadap arah kebijakan dan kualitas demokrasi.

Voting dalam Pilkada dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional warga negara yang sangat penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan di daerah. Para informan menegaskan bahwa menggunakan hak pilih merupakan partisipasi aktif dalam proses demokrasi, di mana suara masyarakat dapat memengaruhi keputusan penting yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Alasan utama masyarakat datang ke TPS didasari oleh kepedulian terhadap masa depan daerah, kepercayaan pada sistem pemilu, dan dukungan terhadap calon tertentu, sedangkan ketidakhadiran dipicu oleh apatisme, ketidakpercayaan, minimnya edukasi politik, hingga hambatan akses. Sikap golput atau tidak memilih meskipun telah terdaftar umumnya disayangkan karena dianggap melewatkan kesempatan menentukan nasib daerah dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Voting juga dinilai sebagai sarana strategis untuk memberikan legitimasi kepada pemimpin terpilih dan memastikan kebijakan publik selaras dengan kehendak rakyat. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya voting, para informan menilai pendidikan politik yang berkelanjutan dan inklusif sangat diperlukan, serta pendekatan yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda, seperti melalui media sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, diskusi publik, dan sosialisasi di komunitas.

3. Partisipasi Politik Informal

a. Kelompok masyarakat sebagai agen penyebaran informasi politik

Kelompok masyarakat seperti komunitas pemuda dan majelis warga dinilai dapat berperan penting dalam menyebarkan informasi politik yang dipercaya dan bermanfaat. Kedekatan mereka secara sosial dan kultural membuat mereka lebih mudah menjangkau masyarakat. Dengan pembekalan informasi dari sumber resmi seperti KPU, mereka bisa menjadi agen literasi politik yang efektif untuk

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

membantu masyarakat memahami proses politik dan menangkal informasi menyesatkan.

b. Pengaruh tokoh masyarakat dalam menentukan pilihan politik

Tokoh masyarakat seperti ketua RT, tokoh agama, dan tokoh adat memiliki pengaruh besar dalam membantu warga menentukan pilihan politik. Kedekatan sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadikan mereka figur yang dihormati dan didengar. Para informan sepakat bahwa jika tokoh-tokoh ini bersikap netral, bijak, dan memberikan pemahaman politik yang sehat, maka mereka dapat membantu masyarakat membuat keputusan politik secara rasional dan objektif.

c. Dorongan untuk menjadi relawan atau pendukung

Motivasi untuk bergabung sebagai relawan atau pendukung dalam pemilu atau pilkada didorong oleh rasa tanggung jawab moral, keinginan untuk berkontribusi dalam demokrasi, dan keyakinan terhadap calon yang didukung. Informan juga ingin mewakili suara kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, serta menyebarkan informasi politik yang benar, terutama kepada generasi muda, agar lebih peduli dan tidak golput. Partisipasi ini dianggap sebagai bentuk nyata dukungan terhadap proses politik yang sehat dan inklusif.

d. Kegiatan yang dilakukan sebagai relawan

Kegiatan yang biasa dilakukan sebagai bagian dari kelompok relawan atau pendukung dalam Pilkada meliputi sosialisasi visi dan misi calon, menyebarkan informasi melalui media sosial, membantu distribusi bahan kampanye, serta mendampingi kegiatan tatap muka dengan masyarakat. Selain itu, relawan juga terlibat dalam edukasi politik secara santun, memberikan penjelasan teknis terkait pemilihan, memastikan aksesibilitas TPS, serta ikut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Tidak jarang juga relawan berperan dalam pengawasan jalannya pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil, dengan tetap menjaga etika demokrasi dan semangat kampanye yang sehat.

- e. Peran kelompok relawan atau pendukung dalam memengaruhi opini politik

Kelompok relawan atau pendukung memiliki peran penting dalam membentuk opini politik masyarakat karena mereka menjadi penghubung langsung antara calon dan pemilih, menyampaikan informasi secara jujur, jelas, dan relevan. Kedekatan sosial relawan dengan masyarakat menjadikan mereka sumber informasi yang dipercaya. Jika relawan bersikap santun, tidak memaksakan pilihan, dan menghindari hoaks, maka pengaruh mereka akan lebih kuat. Peran ini tidak hanya memengaruhi pandangan politik warga, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pemilu.

Partisipasi politik informal memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Kelompok masyarakat seperti komunitas pemuda, majelis warga, serta tokoh masyarakat seperti ketua RT dan tokoh agama dinilai mampu menjadi agen penyebar informasi politik yang terpercaya karena kedekatan sosial dan kultural mereka dengan warga. Dengan pembekalan informasi dari sumber resmi seperti KPU, mereka dapat membantu meluruskan informasi menyesatkan dan mendorong partisipasi politik yang lebih cerdas. Selain itu, partisipasi sebagai relawan atau pendukung juga muncul dari dorongan moral, keinginan untuk mewakili kelompok tertentu, dan semangat berkontribusi dalam demokrasi. Kegiatan relawan meliputi sosialisasi visi-misi calon, penyebaran informasi melalui media sosial atau tatap muka, edukasi teknis dan politik, hingga pengawasan pemilu. Para relawan ini berperan penting dalam membentuk opini publik karena kedekatan mereka dengan masyarakat menjadikan mereka lebih dipercaya. Dengan komunikasi yang jujur, santun, dan tidak memaksakan kehendak, relawan mampu membangun opini politik yang positif dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi Politik KPU Kota Blitar pada Pilkada 2024

Analisis terhadap pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar pada Pilkada 2024 menunjukkan adanya beragam faktor yang memengaruhi keberhasilan proses tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor pendukung yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan sosialisasi serta faktor penghambat yang menimbulkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sosialisasi politik KPU Kota Blitar pada Pilkada 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Lingkungan Sosial yang Terbuka untuk Diskusi

Lingkungan seperti keluarga, tongkrongan, dan komunitas yang terbuka terhadap pembahasan politik menjadi wadah efektif dalam menyampaikan informasi. Interaksi yang akrab dan informal membuat pesan politik lebih mudah diterima dan dipahami.

b. Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh agama, adat, maupun pemuda yang aktif di masyarakat memiliki pengaruh besar karena dianggap sebagai figur yang kredibel dan dihormati. Kehadiran mereka sebagai penyampai pesan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam memahami isu politik.

c. Pemanfaatan Media Sosial secara Bijak

Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi politik secara cepat dan luas. Namun, efektivitas ini bergantung pada kemampuan mengelola konten yang akurat, terpercaya, dan tidak menyesatkan agar tidak memperburuk literasi politik masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Distorsi Informasi

Informasi yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut sering kali tidak melalui proses verifikasi. Hal ini menyebabkan terjadinya distorsi atau penyimpangan pesan politik yang dapat menyesatkan pemahaman masyarakat terhadap isu atau proses politik yang sebenarnya.

b. Rendahnya Literasi Politik Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami proses demokrasi, fungsi pemilu, serta pentingnya suara mereka. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka kurang tertarik terlibat dalam diskusi politik, bahkan cenderung apatis terhadap proses demokrasi.

c. Penyebaran Hoaks Melalui Media Sosial

Media sosial yang seharusnya menjadi sarana penyebaran informasi justru kerap menjadi medium penyebaran hoaks. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat dengan cepat menyebar dan membentuk opini publik yang keliru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi politik yang dilakukan KPU Kota Blitar dalam Pilkada 2024 memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui empat pendekatan utama, yaitu sosialisasi formal, informal, langsung, dan tidak langsung. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran politik masyarakat melalui berbagai media dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi, pelaksanaan sosialisasi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi politik, penyebaran hoaks, serta sikap apatis, khususnya di kalangan generasi muda dan kelompok rentan. Oleh karena itu, KPU disarankan untuk lebih mengoptimalkan media sosial dengan pendekatan segmentatif, meningkatkan kapasitas relawan demokrasi dan duta pemilih, serta memperkuat kerja sama dengan komunitas, lembaga pendidikan, dan media lokal agar sosialisasi lebih menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih aktif mencari dan menyaring informasi politik, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Sementara itu, peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dalam mendukung penyediaan akses informasi yang merata, terutama bagi kelompok marjinal, serta membangun ekosistem pendidikan politik berkelanjutan melalui program pemberdayaan dan dukungan regulasi yang mendukung partisipasi inklusif. Dengan sinergi antara KPU, masyarakat, dan pemerintah, kualitas demokrasi lokal di Kota Blitar diharapkan dapat terus meningkat secara partisipatif dan berkelanjutan.

PERAN SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BLITAR

DAFTAR REFERENSI

- Gusti, N. E. (2024). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Seminar Nasional Universitas Surabaya 204*.
- Lintang.dkk. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 36-48.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: SAGE Publications.
- Siregar, D. &. (2023). Strategi Sosialisasi Politik di Era Digital. *Interaksi Online*.
- Siregar, D. (2024). Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Pilkada. *Jurnal Populis*.
- Siregar, M. (2021). Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 85-93.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.